

KEBIJAKAN PENOLAKAN RUSIA TERHADAP STRATEGI BARAT DI SURIAH

Oleh: Irdyanti

Abstract

This paper attempts to explain the reasons for rejection of Russia against the West in solving conflict in Syria. This paper uses a descriptive approach to analysis of Russia's policy in Syria. Syria is one of the countries in Middle East that is experiencing political turmoil with people demanding President Bashar al-Assad retreated from his position. This conflict has claimed of so many people life that western countries lead to implement the arms and other economic sanctions against Syria but the effort was opposed by Russia through its veto. The balance of power theory tries to explain the refusal of Russia as a form of maintaining power in Middle East, particularly Syria. Russians view the necessary dialogue between the government and the opposition to resolve conflicts rather than international condemnation of Syria.

Key word: rejection of Russia, Balance of Power, Syria's conflict

Pendahuluan

Selama penghujung tahun 2010 hingga awal 2012, kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah mengalami pergolakan politik yang luar biasa dikenal dengan "Jasmine Revolution". Jasmine revolution adalah sebuah revolusi yang menjangar cepat menggoncangkan stabilitas politik di negara-negara Timur Tengah. Revolusi ini dilakukan oleh rakyat kepada penguasa mereka dengan membawa pesan yang sama, yaitu menginginkan perubahan secara fundamental terhadap kekuasaan dan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Mereka menuntut agar hasil-hasil pembangunan tidak lagi dikuasai sekelompok orang yang berkuasa, tetapi harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas. Dengan demikian, masyarakat terbuka dan egaliter dapat terwujud di negara-negara tersebut.

Revolusi ini berawal dari pergolakan rakyat di Tunisia, lalu menyebar ke Mesir, Aljazair, Yaman, Bahrain, Libya dan negara-negara lain di Timur Tengah. Dalam revolusi Jasmine tersebut, dua pemimpin telah meninggalkan jabatannya dan melarikan diri, yaitu mantan Presiden Tunisia, Zine Abidin Ben Ali dan mantan Presiden Mesir, Hosni Mubarak.¹ Sedangkan pemimpin negara lainnya belum dipastikan karena kondisi politik di negara yang masih bergolak. Salah satu negara yang masih bergolak dan menjadi sorotan dunia atas jumlah korban jiwa yang banyak dalam revolusi ini adalah Suriah.

Suriah adalah negara yang sedang mengalami gejolak politik, dimana rakyatnya menuntut mundur Presiden Bashar al-Assad dari jabatannya. Tuntutan rakyat Suriah di latar belakang oleh keberhasilan perjuangan rakyat Tunisia, Mesir, dan Libya yang berhasil menuntut mundur rezim otoriter di ketiga negara tersebut. Tuntutan ini merupakan akumulasi dari ketidakpuasan rakyat Suriah terhadap pemerintahan Assad yang dianggap otoriter. Bashar al Assad telah berkuasa sejak tahun 2000, mewarisi kekuasaan ayahnya Hafez al-Assad, yang berkuasa selama tiga dekade di Suriah.

Revolusi Suriah telah banyak mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Menurut Sekretaris Jenderal untuk urusan politik Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Lynn Pascoe, jumlah korban meninggal dari konflik Suriah mencapai 7.500 orang. Terdapat laporan bahwa jumlah korban meninggal melebihi 100 warga sipil setiap hari dan sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Adapun Pemerintah Suriah menyatakan kehilangan 1.345 pasukan keamanan dan menyebut sebanyak 2.493 warga sipil yang meninggal dunia.² Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memastikan jumlah korban meninggaldunia akibat aksi represif militer Suriah adalah yang terbesar dan terbanyak jika dibandingkan dengan aksi-aksi serupa.

Hal ini kemudian memicu negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk memberikan sanksi kepada Suriah. Negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara sekutu di Timur Tengah yang berada dalam naungan Dewan Keamanan (DK) PBB merampungkan *draft* resolusi untuk menerapkan embargo senjata dan sanksi lainnya terhadap Suriah untuk menghentikan penindasan terhadap para penentang

Presiden al- Assad. Resolusi ini hampir serupa dengan resolusi yang dikeluarkan DK PBB terhadap pemerintahan Muammar Khadafi. Namun keputusan itu ditentang sekutu dekat Suriah, yaitu Rusia dan Cina sebagai dua negara pemegang hak veto terhadap resolusi yang ditawarkan DK PBB.

Setelah menggunakan hak veto-nya untuk menggagalkan *draft* resolusi DK PBB, Rusia tetap melakukan pengiriman senjata ke Suriah. Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Anatoly Antonov mengatakan Rusia tidak akan menghentikan ekspor senjata ke Suriah meskipun kecaman dunia internasional berdatangan. Antolov mengatakan, negaranya tidak melanggar kewajiban internasional dengan menjual senjata ke Damaskus.⁴ Rusia secara konsisten menolak mendukung sanksi yang dipimpin negara-negara Barat terhadap pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Pihak Rusia mengatakan, diperlukan dialog antara pemerintah dan oposisi untuk menyelesaikan konflik Suriah bukan dengan kecaman internasional melalui resolusi DK PBB.

Pembahasan

Kebijakan penolakan oleh Rusia terhadap strategi Barat di Suriah inilah yang akan penulis coba analisa. Kebijakan luar negeri sebuah negara yang *independent* dapat dianalisa dengan banyak cara, salah satunya melalui tingkat keterlibatan suatu negara dalam berbagai bidang isu internasional dan dalam proses penanggulangan ancaman yang berkesinambungan terhadap diri dan sekutunya.

Untuk menjelaskan analisa kebijakan Rusia ini, penulis menggunakan analisa level sistem internasional, yaitu sebuah level/tingkat yang membantu untuk mengkonseptualisasikan betapa banyak dan beragamnya unit-unit yang saling berinteraksi untuk menghasilkan keputusan politik luar negeri sebuah negara.⁶ Dalam level internasional, fokus analisisnya adalah negara dan kepentingannya serta kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan untuk mewujudkan kepentingan negaranya. Pendekatan ini juga menggambarkan bagaimana proses pembuat keputusan berlangsung dengan cara memandang orang-orang (negara) yang secara bersama terlibat dalam proses politik luar negeri sebagai pembentuk sebuah sistem.

Untuk menjelaskan level internasional, teori yang paling impresif dalam menganalisa dan menggambarkannya adalah teori perimbangan kekuasaan (Balance of Power) karya Hans Moregenthau. Ia mulai dengan pendapat bahwa bangsa-bangsa mengejar kepentingan mereka yang didefenisikan sebagai kekuasaan (power). Hasilnya adalah perjuangan atau pergulatan memperoleh kekuatan.

Dalam bentuk yang paling konvensional, teori *balance of power* juga mengasumsikan bahwa ketika posisi sebuah negara dalam keadaan dunia yang anarkis menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup orang lain (negara). Disinilah usaha satu aktor atau lebih untuk menahan kondisi dan memastikan kelangsungan hidup mereka untuk tidak didikte oleh orang lain (negara) sehingga keamanan dalam sistem internasional hanya mungkin terjadi ketika dalam sistem internasional tersebut berusaha untuk mencapai distribusi kekuasaan yang seimbang di antara mereka dalam periode ketegangan konflik.⁷

If there is an orthodox position among theorists, it is that the stability and order of a multistate system, and the security of its constituent parts, are endangered by the rise of any state to preponderance, and that the essential task of the balance of power system is therefore to maintain or restore a situation of approximate equilibrium.

Asumsi yang mendasari teori keseimbangan kekuasaan didasarkan pada asumsi realis. Sebagai sebuah teori, keseimbangan kekuasaan telah berada pada inti realism klasik dan modern. Asumsi realis telah mengembangkan analisis tentang mekanisme pendistribusian kekuasaan dalam sistem internasional melalui perimbangan kekuasaan. Perimbangan kekuasaan biasanya diukur dari sudut pandang kekuatan militer. Bagi kaum realis, tujuan utama dari perimbangan kekuasaan bukanlah untuk menjaga perdamaian, melainkan untuk melindungi keamanan dan kepentingan dari negara-negara (besar), jika perlu dengan cara perang dan militer.

Tujuan yang paling penting bagi sebuah negara adalah menghindari hegemoni negara lain, situasi dimana satu negara mengumpulkan banyak kekuatan sehingga ia mampu mendominasi seluruh negara-negara dalam sistem, yang akan mengakhiri *multistate*.⁸

a. Desakan Pihak Barat terhadap Konflik Suriah

Melihat perkembangan yang semakin memburuk di dalam negeri Suriah, negara-negara yang berada dalam kawasan Timur Tengah yang tergabung dalam Liga Arab tidak tinggal diam. Berbagai sanksi telah mereka tetapkan seperti memutuskan untuk menanggukkan keanggotaan Suriah di organisasi regional

beranggotakan 22 negara Arab tersebut dan menyerukan sanksi-sanksi politik dan ekonomi atas Suriah. Tujuannya hanya satu yaitu menyelesaikan konflik Suriah karena pemerintah Suriah telah gagal menghentikan pertumpahan darah.

Pertama kali yang melakukan sanksi terhadap Suriah adalah negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) meminta Suriah untuk bekerjasama dengan Liga Arab untuk menyerukan kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk turun dari jabatannya. Namun, usaha ini tidak berhasil dan akhirnya Liga Arab meminta bantuan kepada PBB untuk ikut campur dalam penyelesaian konflik di Suriah. Tekanan dunia internasional terhadap rezim Presiden Suriah Bashar Al Assad makin besar setelah wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden, mendesak Assad untuk segera turun dari jabatannya demi terciptanya stabilitas di negara itu, ditambah pendapat yang sama dari negara-negara Uni Eropa dengan menerapkan sanksi ekonomi dan politik.

Hal ini adalah cara yang sama yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam menyelesaikan konflik di Libya. Sebagai hasil dari Resolusi DK PBB No. 1973 yang diprakarsai negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Perancis. Dua negara anggota tetap DK lainnya, yakni Rusia dan Cina, mengambil sikap abstain karena menyadari bahwa negara-negara Barat punya agenda lain dalam mengeluarkan resolusi tersebut dan bukan untuk melindungi rakyat sipil di Libya yang ditembak oleh rezim Libya.⁹

Negara-negara Barat itu melalui NATO¹⁰ meluncurkan serangkaian pengeboman, yang dipimpin oleh Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat, dengan lebih dari 10.000 bom dijatuhkan dari atas tanah Libya. Pesawat-pesawat NATO langsung menyerang kediaman Gaddafi dan markas serta instansi-instansi militer Libya. Bukan hanya itu mereka juga memberikan senjata kepada para pemberontak dan mengebom pasukan loyalitas Gaddafi. Banyaknya jatuh korban jiwa di Libya menurut Federasi Federal Internasional kematian sampai 3000 orang sampai Maret 2011. Pada saat yang sama oposisi mengklaim bahwa 6500 orang yang telah meninggal.¹¹

Tujuan dari resolusi ini berhasil menurunkan Muammar Gaddafi, namun terkesan seperti perang Barat melawan negara Islam, dua negara Arab Teluk, yaitu Qatar dan Uni Emirat Arab membantu secara simbolis pengeboman-pengeboman yang dilakukan pasukan NATO di Libya. Dengan jatuhnya pemerintahan Gaddafi adalah hal yang baik bagi negara-negara Teluk yang selama ini merasa terganggu dengan sikap kritis Gaddafi terhadap mereka.

Melihat keberhasilan di Libya, usaha yang sama juga dicoba oleh pihak Barat untuk menyelesaikan konflik Suriah pada awal tahun 2012, melalui sebuah rancangan resolusi DK PBB yang bertujuan sama, menurunkan Presiden Bashar al-Assad dari kursi pemerintahan. Presiden AS Barack Obama sempat mengatakan bahwa, Presiden Suriah Bashar Al-Assad “tak memiliki keabsahan” setelah berulang kali menghindari peluang bagi pembaruan, sementara hubungan antara Damaskus dan pemerintah Barat menukik tajam setelah pemrotes pro-pemerintah menyerang kedutaan besar AS dan Prancis.¹²

Tindakan Presiden Suriah Bashar al-Assad menyerang oposisinya dianggap sebagai kejahatan yang harus dihentikan. Seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa untuk menekan pemerintahan Presiden al-Assad saat ini adalah meningkatkan sanksi terhadap Suriah dengan melarang impor minyak dari negara itu untuk sementara waktu, tentu ini akan menyulitkan pemerintah Presiden al-Assad dimana pemasukan dari minyak merupakan 25% dari keseluruhan pemasukan Suriah dan Ekspor Suriah kepada Uni Eropa adalah sebesar 95%.¹³ Usaha sekutu negara Barat adalah menutup kedutaan besarnya di Suriah. Enam negara Teluk Arab yang melakukan aksi tersebut adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, Qatar dan Kuwait. Disusul oleh Jepang dan Turki.¹⁴ Sikap ini dipicu konflik berkepanjangan di negara yang dipimpin Bashar al-Assad itu dengan alasan kondisi keamanan yang memburuk di tengah tindakan brutal terhadap demonstran anti-pemerintah.

Kini keadaan politik Suriah semakin memburuk, tindakan penguasa sebagai reaksi terhadap tuntutan rakyat dapat menimbulkan hal yang luar biasa destruktif dengan skala yang masif. Penolakan atau bahkan keengganan penguasa memenuhi tuntutan rakyat dapat berarti konfrontasi antara aparat kekuasaan melawan rakyatnya sendiri. Ditambah dengan dukungan negara sekutu yaitu Rusia yang terus menolak upaya negara Barat untuk menyelesaikan konflik ini. Rusia sempat memperingatkan Barat agar tidak menggunakan ancaman dan ultimatum dalam pendekatannya kepada Pemerintah Suriah.

b. *Balance of Power* Sebagai Alasan Rusia Menolak Strategi Barat di Suriah

PBB merupakan salah satu organisasi internasional yang berperan penting dalam politik internasional saat ini, memiliki tujuan utama yaitu menciptakan perdamaian dunia. Organisasi ini memiliki enam organ utama, salah satunya adalah Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan adalah badan yang ditugaskan untuk menjaga

perdamaian dan keamanan antar negara. Jika organ-organ lain dari PBB hanya bisa membuat ‘rekomendasi’ untuk pemerintah negara anggota, Dewan Keamanan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang mengikat bahwa pemerintah negara anggota telah sepakat untuk melaksanakan menurut ketentuan Piagam Pasal 25, dan keputusan Dewan tersebut dikenal sebagai Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan terdiri dari 15 negara anggota, yang terdiri dari 5 anggota tetap yaitu Cina, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat. 5 negara inilah yang memiliki peranan penting dalam proses penyelesaian konflik dunia yang biasa dikenal sebagai polisi dunia melalui sebuah resolusinya.

Dalam proses penyelesaian konflik di Suriah, Dewan Keamanan PBB menerima proposal dari Liga Arab untuk membuat sebuah rancangan resolusi yang menyerukan kepada Presiden Bashar Al-Assad untuk menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya selama proses transisi politik di negara itu.¹⁵ Tiga belas dari 15 anggota DK PBB menyetujui rancangan resolusi tersebut, tetapi China dan Rusia untuk kedua kalinya menggunakan hak veto mereka setelah pada Oktober 2011 mereka mem-veto rancangan resolusi terhadap Suriah. Ini berarti rancangan resolusi tersebut gagal untuk dilaksanakan.

Tindakan Rusia menggunakan hak veto tersebut dilihat sebagai bentuk dukungan yang besar terhadap Suriah, khususnya selama unjuk rasa anti rezim Presiden Bashar Al-Assad pada awal tahun 2011. Penolakan Rusia ini dilihat sebagai upaya Rusia untuk menghentikan hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. Rusia ingin menunjukkan kepada Barat, khususnya Amerika Serikat tidak bisa bergerak semena-mena secara sepihak melalui rancangan resolusi atas nama PBB.

Demi mempertahankan eksistensi, otonominya dan untuk mengejar kepentingan nasionalnya, setiap negara berusaha kuat agar tidak jatuh ke dalam dominansi bangsa lain manapun. Dengan demikian usaha keras dilakukan untuk mencegah munculnya suatu negara atau koalisi negara yang jauh lebih besar dari pada yang lain. Jika ada tanda-tanda akan munculnya kekuatan besar seperti itu, bangsa-bangsa lain akan berusaha melawannya dengan mengimbangi kekuatan negara yang mengancam itu.¹⁶ Oleh karena itu, Rusia menginginkan adanya perimbangan kekuasaan dengan Barat di wilayah yang sarat konflik itu serta dapat mewujudkan kepentingan nasional melalui situasi yang *balance*.

Di dalam asumsi realis dijelaskan bahwa yang membatasi perilaku negara di dalam dunia internasional adalah kapabilitas negara itu dibandingkan dengan negara lain. Konsekuensi dari itu semua adalah bagaimana untuk menghindari atau meminimalisir ancaman dari negara lain maka negara tersebut harus meningkatkan power dan pengaruhnya terhadap negara lainnya dengan cara mengimbangi kekuatan negara lain (Balance of Power). Dukungan Rusia terhadap Suriah adalah sebagai bentuk mempertahankan kekuasaannya di kawasan Timur Tengah, khususnya di Suriah sebagai sekutu lamanya dan asumsi realis juga menjelaskan, bahwa negara merupakan aktor utama, 2 hal yang penting dalam tentang negara adalah: negara itu berdaulat untuk melakukan yang ia mau, dan negara dimotivasi oleh kepentingan nasional. Mereka mengarahkan kebijakan luar negeri untuk meraih kepentingan nasional.¹⁷

Untuk menganalisa dukungan Rusia kepada Suriah, ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang melatarbelakangi kebijakan tersebut. Pertama, Suriah adalah mitra Rusia dibidang perdagangan. Yevgeny Satanovsky, Presiden Institut Studi Timur Tengah di Moskow (ibu kota Rusia) mengatakan bahwa Rusia saat ini menjadi negara yang memiliki orientasi bisnis yang tinggi dan pemerintah Rusia ingin melindungi investasinya yang ada di Suriah. Selain di bidang perdagangan, kerjasama kedua negara juga terjalin erat di bidang militer dan politik. Dalam satu artikel dari media Rusia, *Moskow Times* melaporkan, Investasi Rusia di Suriah pada tahun 2009 lalu mencapai USD 19,4 miliar atau sekitar Rp 1,7 triliun. Kerjasama yang diselenggarakan oleh Rusia dan Suriah umumnya merupakan perdagangan senjata, pembangunan infrastruktur, kerjasama energi, dan pariwisata.¹⁸

Bagi Rusia, Suriah memiliki nilai strategis secara militer dan politik maupun ekonomi. Dua aspek tersebut tentu dipandang vital oleh Rusia. Dalam aspek militer dan politik adalah pangkalan militer Rusia yang terletak di Suriah. Pangkalan militer Rusia (dulu Uni Soviet) sudah dibangun di kota pelabuhan Tartus sejak tahun 1963.¹⁹ Pada kenyataannya, itu adalah satu-satunya pangkalan militer Rusia di luar teritorinya. Apalagi semenjak runtuhnya Uni Soviet dan ideology komunismenya.

Di samping itu, setelah penasihat militer Uni Soviet diusir dari Mesir pada tahun 1972, Uni Soviet semakin mengandalkan Suriah yang diperintah partai sosialis Baath untuk memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah. Letak geografis Suriah yang berbatasan langsung dengan Israel, Lebanon, Iraq, Turki serta cukup dekat dengan Arab Saudi merupakan posisi yang sangat strategis terhadap politik Rusia di Timur Tengah. Ditambah dengan

kedekatan negara-negara tersebut dengan Amerika Serikat, tentu saja Rusia tidak ingin kehilangan hegemoninya di Timur Tengah. Jika resolusi DK PBB ini dijalankan, tentunya kekuatan AS di daerah tersebut akan semakin besar. Di lain pihak, Rusia tidak menginginkan sekutunya tersebut hancur seperti Libya. Rusia sebelumnya menyatakan penyesalan telah mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Libya, yang kemudian dijadikan dasar bagi NATO untuk melakukan intervensi militer dengan dalih kemanusiaan untuk melindungi warga sipil dari serangan pasukan pemerintah Libya atas perintah Moammar Gadhafi.²⁰

Di bidang ekonomi Suriah juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya. Ini dapat dilihat dari hubungan dagang antara dua negara itu cukup signifikan. Tercatat nilai perdagangan antara mereka mencapai 2 Milliar USD. Bahkan pada 2005 menghapuskan 75 % utang Suriah ke Rusia. Di samping itu, Rusia dan Suriah pada Januari 2012 berhasil mencapai kesepakatan untuk menyuplai Suriah dengan 130 pesawat jet tempur tipe Yak-130 dengan nilai kontrak 550 juta dollar AS dan kontrak bisnis peralatan militer lainnya senilai 700 juta dollar AS.²¹

Perdagangan global senjata yang dilaporkan oleh *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) menyebutkan bahwa Rusia terus memasok Suriah dengan senjata, di tengah embargo senjata oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sejumlah negara lain. Rusia tercatat mengirim 72 persen pasokan senjata rezim Presiden Bashar al-Assad. Impor senjata Suriah meningkat hingga 580 persen selama periode 2002-2006. Ini menaikkan negara itu ke posisi 33 dari posisi 68 dalam peringkat negara pengimpor senjata.

Laporan SIPRI juga menyebutkan, 19 persen senjata Suriah diimpor dari Belarus dan 9 persen sisanya dari Iran.²² Dari data di atas menjelaskan bahwa Rusia memiliki kepentingan tersendiri pada Suriah yang selama ini menjadi sekutunya. Bagi Rusia, peran di dunia internasional bukan semata-mata demi menolong negara lain, tetapi juga memperkuat diri. Peran Rusia di dalam diplomasi internasional dijalankan demi melayani kepentingan domestik. Sergey D. Sazonov, salah seorang mantan Menteri Luar Rusia menekankan kebijakan luar negeri adalah sebuah bagian penting dari kebijakan domestik negara.

Alexander M. Gorbachev, yang juga mantan Menteri Luar Negeri Rusia, memberikan penekanan, Rusia harus memberi perhatian atas hal-hal yang memberi kontribusi pada pembangunan domestik. Semua kebijakan luar negeri harus menjadi subordinasi dari tujuan prinsipil itu. Pernyataan Gorbachev ini menjadi lebih penting, dimana sukses domestik juga tergantung pada faktor-faktor eksternal.²³ Vladimir Putin juga mengatakan keberadaan Rusia sebagai salah satu kekuatan bukan dalam terminologi kekuatan era perang dingin, dimana Rusia menjadi kekuatan menakutkan. Rusia membutuhkan sebuah dunia, yang tidak saling bermusuhan. Rusia membutuhkan multikutub untuk pemeliharaan demokrasi, dan untuk terciptanya sistem internasional yang lebih kuat. Dengan sistem ini negara-negara kecil akan merasa aman dari serangan negara kuat yang memiliki kepentingan sendiri, yaitu negara-negara Barat. Inilah yang dilakukan Rusia dalam mengendepankan kepentingan nasionalnya terhadap sukutunya, Suriah.

c. **Rusia Tetap Bertahan terhadap Strategi Barat**

Dengan digagalkannya usaha PBB dalam menyelesaikan konflik Suriah oleh Rusia, pihak Barat yang mencoba untuk menyelesaikan konflik melalui strategi mereka, kini menghadapi tantangan yang secara signifikan lebih besar jika tetap melakukan intervensi terhadap Suriah, baik secara politik dan militer, dari pada yang mereka lakukan di Libya. Tidak seperti presiden Muammar Gaddafi, Presiden Bashar al-Assad meningkatkan kemampuan angkatan udara dan lautnya sejak pemberontakan terhadapnya muncul tahun 2011. Menurut SIPRI, dalam laporan tahunannya pada transfer senjata global, Suriah menghabiskan miliaran dolar AS untuk belanja senjata ke Rusia, dan jumlahnya meningkat dalam setahun terakhir.

Pada tahun yang sama, Rusia mengirimkan 36 Pantsyr-SI rudal anti pesawat SI ke Suriah. Bersifat ringan dan *mobile*, rudal jarak sedang ini dapat dipasang pada bagian belakang truk, sehingga sulit bagi jet tempur untuk menargetkannya. Selain itu, SIPRI juga percaya Suriah baru-baru ini mendapat kiriman pesawat tempur MiG-29 versi *upgrade*. Jumlah tank T-72 juga dilipatkan setiap tahun sejak 2007.

Selain pengiriman Pantsyr itu, Rusia juga mengirim ke Suriah rudal anti pesawat termmodern, termasuk sekitar 40 rudal SA-17 Grizzly dan dua rudal jarak menengah SA-17 Buk. Meskipun kemarahan dunia atas tindakan keras Assad, Suriah mengumumkan kesepakatan US\$ 550 juta dengan Rusia pada Januari untuk 36 kali latihan ringan dan pesawat tempur yang disebut Yak-130. Jika Qaddafi juga menerima kiriman senjata seperti Presiden, ia akan lebih tangguh dari pada pasukan NATO. Generasi baru senjata anti pesawat tidak

pernah ada di Libya. Melalui perlawanan yang gigih, Assad didukung senjata yang memadai, sulit bagi Barat untuk mengintervensi dengan kekuatan senjata ke negara itu.²⁴

Melihat keadaan ini, pihak Barat sedikit melakukan perubahan terkait sikapnya terhadap Suriah. Namun, Rusia menganggap tindakan pihak Barat tidak cukup untuk mengeluarkan Suriah dari krisis dan mengakhiri aksi kekerasan di negara itu. Di lain pihak, atas tekanan yang dilakukan Rusia, sejumlah lembaga internasional akhirnya menyampaikan gambaran yang lebih realistis atas konflik internal yang terjadi di Suriah. Hasilnya adalah lembaga *Human Right Watch* menuding sebagian kelompok oposisi Suriah telah melanggar HAM dalam aksi mereka menyandra dan menyiksa pasukan keamanan.

Dengan mencermati model aksi kekerasan yang dilakukan sebagian kelompok oposisi Suriah, Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia melihat sikap pemerintah Suriah yang berusaha menahan diri dan tidak menggunakan senjata demi menciptakan keamanan, merupakan sikap yang tidak mungkin. Sekalipun Barat tengah fokus menentang Presiden Bashar al-Assad karena dianggap melakukan pendekatan militer saat menghadapi para oposan, Menlu Rusia justru membenarkan sikap pemerintah Damaskus melanjutkan kebijakan militer guna mengontrol aksi kekerasan yang ada.

Sebelumnya, Rusia menolak keinginan Barat untuk mengembargo penjualan senjata ke Suriah. Bukan hanya menolak, Rusia tidak pernah menghentikan ekspor senjatanya ke Damaskus, bahkan berusaha meningkatkannya.

Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia dalam sebuah wawancaranya dengan Radio Kommersant menyebut tujuan kehadiran sebagian pasukan militer Rusia di pangkalan Angkatan Laut Tartus, Suriah sebagai upaya untuk menghadapi para bajak laut yang mengincar kapal-kapal dagang Rusia di Laut Mediterania. Sekalipun demikian, Rusia menunjukkan keseriusannya menghalangi skenario Barat di Suriah untuk menjatuhkan Bashar Assad. Bahkan dapat terlihat, kebijakan luar negeri Rusia terkait transformasi politik terbaru Barat di Suriah bertumpu pada diplomasi bukan militer.

Berkat kegigihan Moskow melawan segala bentuk rencana Barat untuk melakukan campur tangan militer di Suriah, akhirnya dipilih opsi lain. Barat akhirnya memilih untuk mengutus Kofi Annan, mantan Sekjen PBB untuk membantu menyelesaikan krisis kekerasan di Suriah. Namun, sekalipun Rusia tidak banyak berharap dari Kofi Annan, tapi berjanji mendukung penugasannya. Hal ini menunjukkan betapa Rusia mendukung inisiatif politik dibanding solusi militer dalam kasus Suriah.²⁵

PBB sebagai organisasi dunia akhirnya ikut campur dalam penyelesaian konflik Suriah. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki-moon menegaskan prioritas PBB dalam mengatasi masalah Suriah adalah menghentikan kekerasan yang terus terjadi di negara Timur Tengah itu. Prioritas PBB ada tiga dalam mengatasi permasalahan Suriah. Pertama, menghentikan kekerasan dengan cara apa pun. Prioritas kedua, adalah mencari solusi melalui kesepakatan politik guna memastikan hak-hak asasi warga sipil Suriah terpenuhi. Karena itu, PBB telah mengirim utusan khusus mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan untuk berbicara dengan Presiden Suriah Bashar Al-Assad. Sedangkan prioritas ketiga, adalah menggalang kerja sama internasional dengan berbagai komunitas untuk mencari solusi menyelesaikan konflik di Suriah seperti melalui PBB, Liga Arab, dan juga Organisasi Kerjasama Islam.²⁶

Ban Ki-moon berharap komunitas internasional dapat mencapai satu suara dalam menyelesaikan masalah Suriah dan melibatkan Rusia dalam proses perdamaian, yaitu dimulai pengiriman Duta PBB untuk melakukan negosiasi. Kofi Annan, adalah utusan khusus PBB dan Liga Arab yang melakukan negosiasi dengan Presiden Rusia Dmitry Medvedev sebagai bagian dari upaya untuk mengakhiri kekerasan yang sudah berlangsung setahun di Suriah dan menewaskan sedikitnya 7500 orang.

Presiden Medvedev mengatakan negosiasi adalah kesempatan akhir Suriah untuk mencegah perang saudara yang sudah berlangsung lama dan Rusia akan menawarkan dukungan penuh pada tingkat manapun sepanjang hal itu mampu dilakukan Rusia.²⁷ Hasil pertemuan tersebut, utusan khusus Kofi Annan telah mengajukan enam butir rencana perdamaian, termasuk gencatan senjata, penarikan segera persenjataan berat dari wilayah-wilayah permukiman dan bantuan kemanusiaan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, didapat kesimpulan sebagai berikut: Kebijakan Penolakan Rusia Terhadap Strategi Barat Di Suriah terkait keputusannya untuk mengakhiri konflik yang terjadi di Suriah yang digagas oleh negara-negara Eropa. Hal ini dikarenakan untuk mencegah hegemoni negara Barat di Timur Tengah khususnya Suriah dengan menjaga keseimbangan kekuasaan dan mengamankan kebijakan politik luar negeri Rusia yang otonom. Dukungan Rusia kepada Suriah juga dilatarbelakangi beberapa faktor, yaitu:

Pertama, Rusia menginginkan adanya perimbangan kekuasaan dengan Barat di wilayah yang sarat konflik itu serta dapat mewujudkan kepentingan nasionalnya melalui situasi yang *balance*, melaluipenghentian hegemoni negara-negara Barat di Timur Tengah khususnya Suriah. Rusia juga tidak ingin mengulang kesalahan dengan memberikan jawaban abstain seperti ketika resolusi yang dirancang untuk Libya, sehingga resolusi tersebut akhirnya disalahgunakan oleh NATO untuk melegalkan serangannya di Libya. *Kedua*, Suriah merupakan salah satu mitra dagang terbesar Rusia. Sehingga Rusia berusaha melindungi asset-asetnya. Jauh sebelum revolusi menggugang Timur Tengah, kerjasama militer antara Rusia dan Suriah sudah terjalin cukup erat. Sampai saat inipun Rusia terus mengeksport senjata ke Suriah. *Ketiga*, Rusia lebih memilih perwakilan PBB, yaitu Kofi Annan sebagai perantara diplomasi atas konflik Suriah. Rencana Annan bagi pemerintah Suriah adalah untuk menarik pasukan PBB dari kota-kota di tengah kekhawatiran Barat bahwa rencana perdamaian itu tidak akan terlaksana. Hal ini juga disetujui oleh pihak Rusia yang menjelaskan bahwa Suriah harus lebih tegas dalam memenuhi rencana Kofi Annan, dan meminta Suriah untuk secara ketat menerapkan semua kewajibannya sesuai dengan rencana Kofi Annan dan Rusia secara konsisten bekerja untuk menuju tujuan (demokrasi di Suriah) dengan pemerintah Suriah tanpa ada agenda tersembunyi, mengharapkan perdamaian dan perkembangan bagi Suriah.

Endnote

- ¹ Apriadi Tamburaka. 2011. *Revolusi Timur Tengah, Kejatuhan Para penguasa Otoriter di Neagar-negar Timur Tengah*. Jakarta: PT. Buku Seru, halaman: 9.
- ² Hillary sebut Assad: Penjahat Perang, 29 Pebruari 2012 pada <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/02/29/m05agp-hillary-sebut-assad-penjahat-perang>, diakses pada 8 April 2012.
- ³ Lima anggota tetap dalam Dewan Keamanan PBB memiliki hak istimewa yang disebut hak veto. Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi. Hak ini tidak dimiliki oleh satupun anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
- ⁴ Tolak Resolusi Sanksi PBB, Rusia Tetap Jual Senjata ke Suriah, Jumat, 03 Pebruari 2012 pada <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/02/03/lyt4nr-tolak-resolusi-sanksi-pbb-rusia-tetap-jual-senjata-ke-suriyah>, diakses pada 8 April 2012.
- ⁵ KJ. Holsti, (alih bahasa: M. Tahir Azhary) 1983. *Internasional Politik*. Jakarta: Erlangga, halaman 108.
- ⁶ Mohtar Mas' oed. 1989. *Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisis*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial UGM, halaman 117.
- ⁷ Ralf Emmer. 2003. *Cooperative Security and the Balance of Power in ASEAN and the ARF*. London: Routledge Curzon, halaman 41.
- ⁸ Jack S Lavy. *What do Great Powers Balance Againsts and When?* dalam T. V. Paul, James J. Wirtz, and Michel Fortmann (edited). 2004. *Balance of Power, Theory and Practice in 21st Century*. California: Standford University, halaman 31.
- ⁹ Antara Libya, Suriah dan Bahrain, tanggal 15 November 2011 dalam <http://www.faktapos.com/kolom/13224/antara-libya-suriyah-dan-bahrain>, diakses pada tanggal 5 Februari 2012.
- ¹⁰ Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization) adalah sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949, sebagai bentuk dukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara yang ditanda tangani di Washington, DC pada 4 April 1949.
- ¹¹ *Ibid*, Apriadi Tamburaka, halaman 237.
- ¹² *Barat Tingkatkan Tekanan Agar PBB Bertindak Terhadap Suriah*, 13 Juli 2011 dalam http://vibizportal.com/update_vibizdaily/index/2684/2270, diakses pada tanggal 14 April 2012.
- ¹³ Uni Eropa memboikot minyak Suriah, 2 September 2011 pada http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/09/110902_eusyriaoil.shtml, diakses pada tanggal 14 Februari 2012.
- ¹⁴ Turki Tutup Kedutaan di Suriah, 26 Maret 2012 pada <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/03/26/m1hmr-g-turki-tutup-kedutaan-di-suriyah>, diakses pada tanggal 8 April 2012.
- ¹⁵ DKK PBB Akan Lakukan Voting untuk Suriah pada <http://internasional.kompas.com/read/2012/02/04/13080134/DKK.PBB.Akan.Lakukan.Voting.untuk.Suriyah>, diakses pada 14 Pebruari 2012.
- ¹⁶ Mohtar Mas' oed. 1989. *Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisis*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial UGM, halaman 194.
- ¹⁷ Jill dan Llyod Pettiford. 2009. *Hubungan Internasional, Perspektif dan Tema*. Jakarta: Pustaka Belajar, halaman 58.
- ¹⁸ Inilah Alasan Mengapa Rusia Membela Suriah, 20 September 2011 pada <http://international.okezone.com/read/2011/09/20/412/504686/inilah-alasan-mengapa-rusia-membela-suriyah>, diakses pada tanggal 1 April 2012.
- ¹⁹ Hubungan Rusia-Suriyah Amat Strategis, 13 Februari 2012 dalam <http://internasional.kompas.com/read/2012/02/13/08091460/Hubungan.Rusia-Suriyah.Amat.Strategis>, diakses pada 15 Februari.

- ²⁰ Rusia tidak mau Suriah hancur Seperti Libya, 30 November 2011 diakses pada <http://www.suarapembaruan.com/home/rusia-tak-mau-suriah-hancur-seperti-libia/14241>, diakses pada 13 Pebruari 2012.
- ²¹ Hubungan Rusia-Suriah Amat Strategis, 13 Pebruari 2012 <http://internasional.kompas.com/read/2012/02/13/08091460/Hubungan.Rusia-Suriah.Amat.Strategis> diakses pada 15 Pebruari 2012.
- ²² 72 Persen Senjata Suriah Diimpor dari Rusia, 19 Maret 2012 pada <http://internasional.kompas.com/read/2012/03/19/12043477/72.Persen.Senjata.Suriah.Diimpor.dari.Rusia>, diakses pada 1 April 2012.
- ²³ Simon Saragih. 2008. *Bangkitnya Rusia*. Jakarta: Kompas, halaman: 139.
- ²⁴ Mengapa Suriah Tak Bisa 'Di-Libya-kan'?, 20 Maret 2012 pada <http://www.tempo.co/read/news/2012/03/20/115391351/Mengapa-Suriah-Tak-Bisa-Di-Libya-kan> diakses pada tanggal 10 April 2012.
- ²⁵ Soal Suriah, Rusia Tetap Tidak Bergeming Menghadapi Barat, 21 Maret 2012 pada http://indonesian.irib.ir/fokus/-/asset_publisher/v5Xe/content/id/5038980, diakses pada tanggal 10 April 2012.
- ²⁶ PBB Prioritaskan Penghentian Kekerasan Di Suriah, 20 Maret 2012 pada <http://beritasore.com/2012/03/20/pbb-prioritaskan-penghentian-kekerasan-di-suriah/>, diakses pada 8 April 2012.
- ²⁷ Kofi Annan Upayakan Dukungan Rusia untuk Atasi Konflik di Suriah, 9 April 2012 pada <http://www.voaindonesia.com/content/kofi-annan-upayakan-dukungan-rusia-untuk-atasi-konflik-suriah-144153685/109354.html>, diakses pada tanggal 9 April 2012

DAFTAR PUSTAKA

- Emmer, Ralf. 2003. *Cooperative Security and the Balance of Power in ASEAN and the ARF*. London: Routledge Curzon.
- Holsti, KJ. (alih bahasa: M. Tahir Azhary). 1983. *Internasional Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Mas'ood, Mohtar. 1989. *Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisi*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial UGM.
- Saragih, Simon. 2008. *Bangkitnya Rusia*. Jakarta: Kompas.
- Steans, Jill dan Llyod Pettiford. 2009. *Hubungan Internasional, Perspektif dan Tema*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Tamburuka, Apriadi. 2011. *Revolusi Timur Tengah, Kejatuhan Para penguasa Otoriter di Negara-negara Timur Tengah*. Yogyakarta: PT. Narasi
- Wirtz, T. V. Paul, James J and Michel Fortmann (ed). 2004. *Balance of Power, Theory and Practice in the 21st Century*. California: Standford University Press.
- Hillary sebut Assad: Penjahat Perang, 29 Pebruari 2012 pada <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/02/29/m05agp-hillary-sebut-assad-penjahat-perang>, diakses pada 8 April 2012
- Tolak Resolusi Sanksi PBB, Rusia Tetap Jual Senjata ke Suriah, Jumat, 03 Pebruari 2012 pada <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/02/03/lyt4nr-tolak-resolusi-sanksi-pbb-rusia-tetap-jual-senjata-ke-suriah>, diakses pada 8 April 2012
- Barat Tingkatkan Tekanan Agar PBB Bertindak Terhadap Suriah*, 13 Juli 2011 dalam http://vibizportal.com/update_vibizdaily/index/2684/2270, diakses pada tanggal 14 April 2012
- DKK PBB Akan Lakukan Voting untuk Suriah pada <http://internasional.kompas.com/read/2012/02/04/13080134/DKK.PBB.Akan.Lakukan.Voting.untuk.Suriah> diakses pada 14 Pebruari 2012
- Inilah Alasan Mengapa Rusia Membela Suriah, 20 September 2011 pada <http://international.okezone.com/read/2011/09/20/412/504686/inilah-alasan-mengapa-rusia-membela-suriah> diakses pada tanggal 1 April 2012
- Hubungan Rusia-Suriah Amat Strategis, 13 Februari 2012 dalam <http://internasional.kompas.com/read/2012/02/13/08091460/Hubungan.Rusia-Suriah.Amat.Strategis>, diakses pada 15 Februari
- Rusia tidak mau Suriah hancur Seperti Libya, 30 November 2011 diakses pada <http://www.suarapembaruan.com/home/rusia-tak-mau-suriah-hancur-seperti-libia/14241> pada 13 Pebruari 2012
- 72 Persen Senjata Suriah Diimpor dari Rusia, 19 Maret 2012 pada <http://internasional.kompas.com/read/2012/03/19/12043477/72.Persen.Senjata.Suriah.Diimpor.dari.Rusia>, diakses pada 1 April 2012
- PBB Prioritaskan Penghentian Kekerasan Di Suriah, 20 Maret 2012 pada <http://beritasore.com/2012/03/20/pbb-prioritaskan-penghentian-kekerasan-di-suriah/>, diakses pada 8 April 2012

: Jurnal Pemikiran Islam; Vol. 37, No. 2 Juli-Desember 2012